

## Strategi Pengelolaan Kelembagaan Kelompok Tani Kelas Utama di Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Arieyanti Dwi Astuti<sup>1\*</sup>, Jatmiko Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

\* Corresponding author: [antiek24@gmail.com](mailto:antiek24@gmail.com)

---

### Abstrak

Sektor pertanian di Kabupaten Pati mengalami laju pertumbuhan negatif (-0,20%) pada tahun 2021. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok tani (poktan). Hal ini ditunjukkan dari rendahnya jumlah kelompok tani kelas utama yang hanya berjumlah empat dari 2.588 kelompok tani, yang menunjukkan bahwa baru sekitar 0,15% poktan dari total poktan di Kabupaten Pati yang sudah mandiri. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kapasitas kelembagaan poktan melalui pengembangan pengelolaan kelembagaan pada poktan kelas utama. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kualitatif. Data dianalisis menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan jumlah responden 56 orang. Pengelolaan kelompok tani dipengaruhi lima kriteria yaitu Perencanaan, Pengembangan kepemimpinan kelompok tani, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengendalian pelaporan. Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan kriteria dan subkriteria yang paling berpengaruh dalam pengelolaan kelembagaan poktan kelas utama dengan menggunakan AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan menjadi kriteria yang paling berpengaruh dalam pengelolaan kelembagaan poktan kelas utama dengan bobot 29,09%. Subkriteria yang paling berpengaruh pada Kriteria Pelaksanaan adalah Subkriteria Pelaksanaan Usaha dengan bobot 36,81%.

Kata kunci: Kelompok tani, Pengelolaan, Sektor pertanian

---

### Abstract

*The agricultural sector in Pati Regency is experiencing a negative growth rate (-0.20%) in 2021. One reason is the weak capacity of farmer groups (poktan). This is shown by the low number of main class farmer groups, which only amounted to four out of 2,588 farmer groups, which indicates that only about 0.15% of the total farmer groups in Pati Regency are already independent. Therefore, it is necessary to develop the capacity of farmer groups through the development of institutional management in the main class of farmer groups. This research is a qualitative quantitative research. Data were analyzed using the Analytical Hierarchy Process (AHP) with 56 respondents. Farmer group management is influenced by five criteria, namely planning, developing farmer group leadership, organizing, implementing and controlling reporting. The purpose of this research is to determine the criteria and subcriteria that have the most influence on the institutional management of main class farmer groups using AHP. The results of the research show that Implementation is the most influential criterion in the institutional management of main class farmer groups with a weight of 29.09%. The subcriteria that has the most influence on the Implementation Criteria is the Business Implementation Subcriteria with a weight of 36.81%.*

*Keywords: Agricultural sector, Farmer groups, Management*

---

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan pilar utama pembangunan perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan hampir seluruh kegiatan perekonomian berpusat pada sektor tersebut (Dermoredjo & Noekman, 2006). Peranan sektor pertanian dalam suatu negara atau daerah dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya melalui kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Arifin, 2004). Perkembangan PDB atau PDRB dari tahun ke tahun menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Pembangunan ekonomi di tingkat pusat maupun daerah dibagi menjadi sembilan sektor perekonomian, dimana pertanian menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar dalam perekonomian Indonesia.

Sektor pertanian telah dan akan terus berkontribusi bagi pembangunan ekonomi baik di pusat maupun daerah. Sektor ini merupakan basis ekonomi masyarakat di perdesaan, menyerap lebih dari separuh total tenaga kerja, menguasai kehidupan sebagian besar masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan bahkan menjadi katup pengaman ekonomi Indonesia saat pandemi Covid-19 (Arifin, 2004; Suryana *et al.*, 2020). Hampir seluruh wilayah Indonesia menempatkan sektor pertanian sebagai sektor strategis dalam perekonomian daerahnya, termasuk Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Sektor pertanian secara luas (sektor pertanian, kehutanan, perikanan) di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah merupakan penyumbang terbesar kedua PDRB tahun 2020 yaitu 25,59% (BPS Kabupaten Pati, 2021). Sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dibandingkan sektor perekonomian lainnya yaitu 32,70% dari total penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Bahkan, saat pandemi Covid-19, serapan tenaga kerja di sektor ini mengalami peningkatan sebesar 20,4%. Saat pandemi Covid-19, sektor pertanian tetap mengalami pertumbuhan ekonomi positif (2,20%) meskipun melemah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (RKPD Kabupaten Pati, 2022; RKPD Kabupaten Pati, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian juga memiliki ketahanan terhadap guncangan struktural perekonomian secara makro.

Namun demikian, pada tahun 2021 sektor pertanian di Kabupaten Pati mengalami laju pertumbuhan negatif (-0,20%) (BPS Kabupaten Pati, 2022). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kapasitas kelembagaan kelompok tani (poktan) yang lemah,

ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pertanian yang belum optimal, serta kualitas tenaga kerja pada sektor pertanian yang relatif rendah karena didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan rendah dan usia tua (>40 tahun) (RKPD Kabupaten Pati, 2023). Kondisi ini serupa dengan penelitian Anantanyu (2009) yang menyatakan bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan merupakan masalah yang lazim dialami oleh sebagian besar kelompok tani di Indonesia.

Dari ketiga faktor penyebab tersebut, faktor yang harus diatasi terlebih dahulu adalah mengenai kelembagaan kelompok tani. Kelompok tani merupakan kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota (Permentan Nomor 67 Tahun 2016). Kapasitas kelompok tani memegang peran penting dalam pengembangan usaha tani. Jika suatu kelompok tani sudah berjalan sesuai fungsinya, maka kedua faktor lainnya (belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pertanian, dan rendahnya kualitas tenaga kerja pada sektor pertanian) secara otomatis akan teratasi. Hal ini sejalan dengan Nasrul (2012) yang menyatakan bahwa para petani harus bergerak dalam suatu lembaga (tidak berjalan sendiri-sendiri) dalam menjalankan usaha tani. Dalam hal ini, petani harus menjadi subjek dalam proses tersebut, bukan sebagai objek. Tergabungnya petani dalam suatu lembaga dengan kapasitas kelembagaan yang kuat, akan mampu meningkatkan posisi tawar petani. Peningkatan posisi tawar petani akan menciptakan kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di sub sistem *on farm* dengan pelaku agribisnis di sub sistem hulu hilir. Jika kondisi ini tercapai, produktivitas pertanian akan mengalami peningkatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani menjadi lebih sejahtera (Nasrul, 2012). Sama halnya dengan Anantanyu (2011) yang menyatakan bahwa kelembagaan petani memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku usaha tani.

Kapasitas yang dimiliki suatu poktan menggambarkan kemampuan poktan tersebut. Kemampuan poktan adalah kapasitas/kompetensi yang dimiliki poktan dalam menjalankan fungsi dan peran kelembagaannya dalam mengembangkan usaha tani berbasis agribisnis (Kementerian Pertanian, 2018). Kemampuan setiap kelompok tani perlu diketahui untuk menentukan posisi poktan, sebagai langkah pertama dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan poktan. Kemampuan poktan akan dinilai menggunakan kriteria-kriteria Panca Kemampuan Kelompok Tani (Pakem Poktan) menurut Pedoman

Penilaian Kemampuan Kelas Kelompok Tani (Kementerian Pertanian, 2018). Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk pemeringkatan poktan ke dalam 4 kelas, yaitu kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Kelas pertama merupakan kelas dengan level paling bawah. Poktan dengan kelas pertama merupakan poktan yang baru terbentuk. Poktan kelas pertama bisa naik ke level selanjutnya yaitu kelas pemula/kelas lanjut, jika persyaratan untuk naik kelas bisa dipenuhi. Kelas utama merupakan kelas dengan level paling tinggi. Poktan kelas utama menggambarkan poktan yang sudah mampu mandiri, memiliki usaha tani yang sudah berkembang dari hulu (*on farm*) sampai ke hilir (*off farm*). Semakin tinggi kelas poktan maka semakin mandiri poktan tersebut.

Kelompok tani di Kabupaten Pati berjumlah 2.588 kelompok, yang secara rinci terdiri atas 4 poktan kelas utama, 78 poktan kelas madya, 830 poktan kelas lanjut, 1.612 poktan kelas pertama, dan 64 poktan yang belum diketahui statusnya (Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 2021). Kelompok tani yang belum diketahui statusnya merupakan poktan yang tercatat secara administrasi namun keberadaannya secara fisik tidak diketahui dan saat ini masih ditelusuri dan dievaluasi oleh pihak terkait untuk ditetapkan statusnya. Data ini menunjukkan bahwa kelompok tani yang sudah mandiri (kelas utama) baru sekitar 0,15% dari total kelompok tani di Kabupaten Pati, dan sisanya sekitar 99,85% dianggap belum mandiri. Kondisi inilah yang menggambarkan lemahnya kapasitas kelembagaan poktan di Kabupaten Pati sebagai salah satu faktor penyebab minusnya laju pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2021, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Kemandirian poktan akan terwujud jika kapasitas kelembagaannya kuat. Semakin kuat kapasitas kelembagaan suatu poktan, semakin tinggi tingkat kemandirian poktannya. Hal ini dikarenakan kapasitas kelembagaan poktan sangat menentukan peran poktan dalam mengembangkan usaha tani. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan kapasitas kelembagaan terhadap poktan yang masih belum mandiri. Pengembangan kapasitas kelembagaan poktan merupakan salah satu pendekatan dalam pemberdayaan kepada petani secara kolektif. Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani akan membawa perubahan pada para petani anggotanya (Prasetyono, 2019), yang pada akhirnya akan mampu memberikan dampak positif pada sektor pertanian sebagai sektor strategis di Kabupaten Pati.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya yang tepat untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan poktan. Pada penelitian ini dilakukan 2 (dua) pembatasan yaitu 1)

peningkatan kapasitas kelembagaan poktan dilakukan melalui pengelolaan kelembagaan poktan saja. Pengelolaan kelembagaan poktan didasarkan pada 5 (lima) kriteria kemampuan poktan (Pakem Poktan). Selanjutnya, dari kelima kriteria tersebut akan ditentukan bobotnya melalui pembobotan kriteria sekaligus subkriteria-subkriteria dibawahnya. Pembobotan ini dilakukan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Pemilihan metode AHP ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yaitu Kristianto (2022) yang menggunakan AHP dalam menilai skala prioritas untuk menyusun strategi pengembangan usaha budidaya ternak kerbau pada kelompok tani di Kalimantan Timur; 2) pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada poktan kelas utama. Pertimbangan ini dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman/ccontoh/rujukan bagi poktan kelas dibawahnya (kelas pertama, kelas lanjut, dan kelas madya) dalam upaya menaikkan kelas poktannya. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kriteria dan subkriteria yang paling berpengaruh dalam pengembangan kapasitas kelembagaan poktan kelas utama melalui pengelolaan kelembagaannya di Kabupaten Pati dengan menggunakan AHP.

## METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Oktober 2022 di Kabupaten Pati, pada 11 kecamatan. Penentuan 11 (sebelas) kecamatan ini didasarkan pada persebaran wilayah Kabupaten Pati secara merata yang terbagi dalam 4 wilayah yaitu Pati Utara (Kecamatan Tayu, Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Margoyoso, dan Kecamatan Wedarijaksa), Pati Selatan (Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Jakenan, dan Kecamatan Gabus), Pati Timur (Kecamatan Batangan dan Kecamatan Juwana), dan Pati Barat (Kecamatan Margorejo). Responden pada penelitian ini berjumlah 56 orang, yang ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampling yang dilakukan dengan memilih sekelompok orang tertentu yang dianggap memiliki keahlian (*expertise*) di bidang tersebut dan metode ini sesuai digunakan untuk penelitian kuantitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi (Purnamasari, 2017; Sugiyono, 2016). Jumlah responden tersebut sudah memenuhi prasyarat jumlah minimal responden yang menggunakan metode AHP, yaitu 15 orang. Penentuan responden ini juga telah mewakili unsur ABCG (*Academic, Bussines, Community, dan Government*) (Susilowati & Kirana, 2008). Responden pada penelitian berjumlah 56 orang yang terdiri atas 20 orang anggota poktan, 20 orang dari pemerintah

desa, 11 orang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan 5 orang dari dinas instansi terkait selaku pengambil kebijakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengetahui kriteria maupun subkriteria yang memiliki bobot atau tingkat kepentingan tertinggi dengan menggunakan teknik *Analytical Hierarchy Process (AHP)* (Lubis *et al.*, 2019). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui alasan responden dalam memberikan pembobotan pada kriteria maupun subkriteria, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperkaya hasil penelitian kuantitatif (Prakoso *et al.*, 2021).

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner dan wawancara oleh responden, dan hasil *Focus Group Discussion (FGD)*. Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati dan Dinas Pertanian Kabupaten Pati; dan beberapa referensi yang relevan. Setelah semua data diperoleh, data kemudian dianalisis menggunakan AHP.

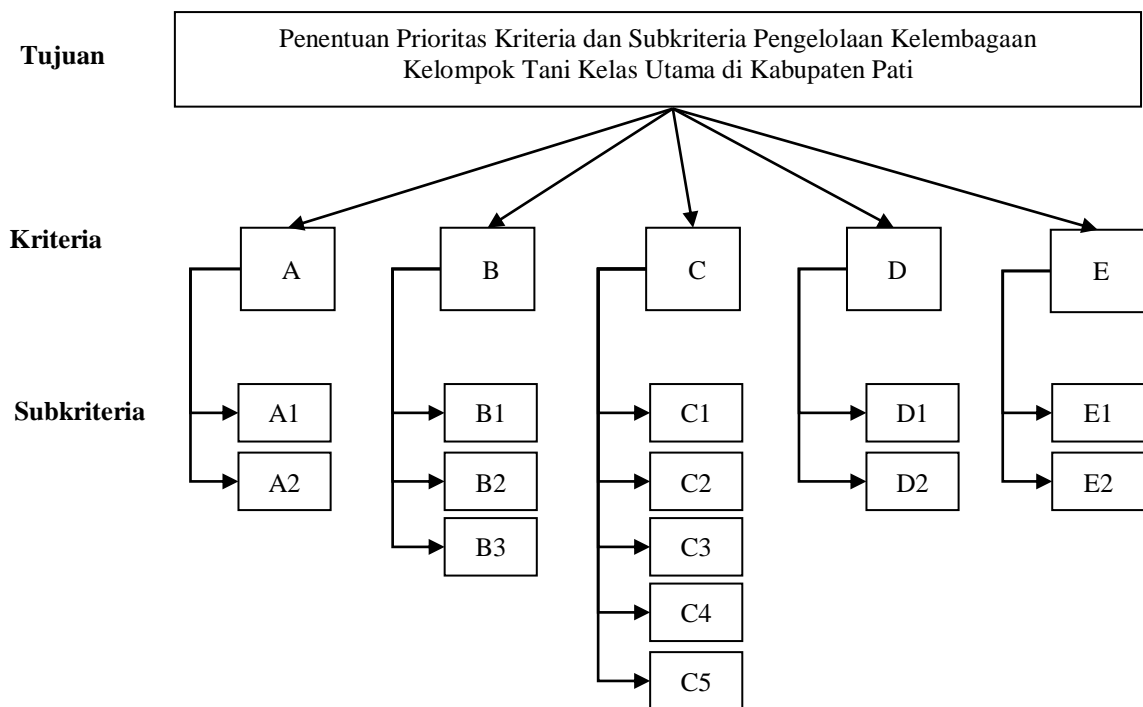
#### **Model Hierarki AHP**

Model hierarki AHP pada penelitian ini mengacu pada penelitian Andriati & Wigenda (2011), yang menyusun hierarki AHP ke dalam 5 level, dengan level paling atas berupa fokus dan level paling bawah berupa alternatif pengolahan. Pada penelitian ini, hierarki AHP menggunakan 3 level. Level paling atas berupa tujuan utama yang ingin dicapai yaitu menentukan kriteria dan subkriteria yang paling berpengaruh dalam pengelolaan kelembagaan poktan di Kabupaten Pati. Level berikutnya adalah level yang mencakup kriteria-kriteria pengelolaan kelembagaan poktan, dan level paling bawah adalah subkriteria-subkriteria pada masing-masing kriteria pengelolaan kelembagaan poktan.

Untuk bisa mencapai tujuan pada level paling atas dibutuhkan kriteria-kriteria yang berada pada level dibawahnya. Kriteria-kriteria tersebut merupakan kriteria pengelolaan kelembagaan poktan berdasarkan Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani dari Kementerian Pertanian (2018) yang berjumlah 5 kriteria. Kelima kriteria tersebut adalah Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian Pelaporan, dan Pengembangan Kepemimpinan Poktan. Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian kriteria-kriteria pada level kedua, dibutuhkan subkriteria pada masing-masing kriteria yang berfungsi sebagai indikator untuk mencapai kriteria diatasnya. Subkriteria-

subkriteria tersebut berada pada level terakhir dalam urutan hierarki AHP pada penelitian ini.

Jumlah total subkriteria yang digunakan adalah 14 subkriteria, yang terbagi pada masing-masing kriteria. Kriteria Perencanaan (A) memiliki 2 subkriteria yaitu Rencana Belajar (A1) dan Rencana Usaha (A2). Kriteria Pengorganisasian (B) memiliki 3 subkriteria yaitu Struktur Organisasi (B1), Aturan Norma (B2), dan Administrasi Pembukuan (B3). Kriteria Pelaksanaan (C) memiliki 5 subkriteria yaitu Pertemuan Rutin (C1), Pelaksanaan Belajar (C2), Pelaksanaan Usaha (C3), Pemupukan Modal (C4), dan Pelayanan Informasi Teknologi (C5). Kriteria Pengendalian Pelaporan (D) memiliki 2 subkriteria yaitu Monitoring Usaha Kelompok (D1) dan Evaluasi Usaha Kelompok (D2). Kriteria Pengembangan Kepemimpinan Poktan (E) memiliki 2 subkriteria yaitu Pengembangan Kapasitas (E1) dan Pengkaderan Pengurus (E2). Model hierarki AHP pengelolaan kelembagaan kelompok tani di Kabupaten Pati ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Hierarki AHP pengelolaan poktan kelas utama di kabupaten pati  
 sumber: pengolahan data, 2022

Tahap selanjutnya adalah menentukan matriks berpasangan yang didasarkan pada responden dalam memberikan penilaian pentingnya 1 kriteria atas kriteria lainnya saat pengisian kuesioner dengan menggunakan skala berpasangan pada Tabel 1. Hasil penilaian responden tersebut kemudian dilakukan perataan jawaban atau *geometric mean*

*theory*, untuk kemudian dikalikan sehingga akan diperoleh *eigen vector*. *Eigen vector* merupakan bobot kriteria/subkriteria yang kita nilai.

Tabel 1. Skala penilaian perbandingan berpasangan

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya
5	Elemen yang satu mutlak sangat penting dari elemen lainnya
2,4	Nilai-nilai antar dua nilai pertimbangan yang berdekatan
Kebalikan	Jika aktivitas 1 mendapat satu angka dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikan dibandingkan 1

Sumber: Munthafa & Mubarak, 2017

Data yang telah diperoleh tersebut harus konsisten sehingga perlu diketahui nilai rasio konsistensi (*Consistency Ratio/CR*) yang diperoleh dari perbandingan indeks konsistensi (*Consistency Index/CI*) dengan nilai Indeks Random (*Random Index/RI*) yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar *random index* (RI)

n	2	3	4	5	6	7	...
RI <sub>n</sub>	0	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	...

Sumber: Munthafa & Mubarak, 2017

Jika data yang dihitung memiliki nilai CR <0,1 maka data dianggap konsisten. Jika CR >0,1 maka data dianggap tidak konsisten, sehingga harus dilakukan evaluasi ulang terhadap pemberian nilai intensitas kepentingan saat pengisian kuesioner (Munthafa & Mubarak, 2017; Sudrajat *et al.*, 2020; Nursita *et al.*, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Umum Responden

Penelitian ini melibatkan 56 responden yang terpilih secara purposive. Karakteristik umum responden berdasarkan karakter demografinya disajikan pada Tabel 3. Ditinjau dari jenis kelamin, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (87%), sisanya responden berjenis kelamin perempuan (13%). Berdasarkan usia, responden yang berada pada rentang usia 46-55 tahun mendominasi dengan persentase sebesar 49%, diikuti dengan responden pada rentang usia 36-45 tahun yaitu 29%. Responden pada rentang usia 56-65 tahun memiliki persentase sebesar 13%, diikuti dengan persentase 7% pada responden rentang usia 26-35 tahun, dan responden yang memiliki persentase paling kecil (2%) merupakan respondengan pada usia >65 tahun.



Tabel 3. Karakter demografi responden

Karakter Demografi	N responden (orang)	Persentase (%)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Perempuan	7	13
Laki-laki	49	87
<b>Usia</b>		
26-35 tahun	4	7
36-45 tahun	16	29
46-55 tahun	27	49
56-65 tahun	7	13
> 65 tahun	1	2
<b>Tingkat Pendidikan</b>		
SMP	2	4
SMA	39	69
D3/S1	13	23
S2	2	4

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Dari tingkat pendidikan, mayoritas responden berpendidikan terakhir SMA sebanyak 69%, kemudian diikuti dengan persentase 23% pada responden dengan pendidikan terakhir D3/S1. Untuk responden dengan pendidikan terakhir SMP dan S2 menempati peringkat terbawah dengan persentase masing-masing 2%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan di atas rata-rata tingkat masyarakat Kabupaten Pati yaitu sekitar SMP kelas 2 atau lama menempuh pendidikan selama 7,2 tahun. Responden yang berpendidikan SMP pada penelitian ini berminatpencaharian sebagai petani, sedangkan responden yang berpendidikan S2 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

#### **Gambaran Umum Kelompok Tani Kabupaten Pati**

Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) per November 2021 menyebutkan bahwa jumlah kelompok tani di Kabupaten Pati sebanyak 2.588 kelompok yang terbagi atas 1.612 poktan kelas pemula, 830 poktan kelas lanjut, 78 poktan kelas madya, dan 4 poktan kelas utama, serta 64 poktan yang belum diketahui statusnya (Tabel 4). Poktan yang belum diketahui statusnya merupakan poktan yang tercatat secara resmi secara administrasi namun keberadaannya secara fisik tidak diketahui dan saat ini masih ditelusuri oleh pihak terkait untuk ditetapkan statusnya.

Tabel 4. Distribusi kelas poktan kabupaten pati tahun 2021

Kelas Kelompok	Jumlah	Persentase
Pemula	1.612	62,29
Lanjut	830	32,07
Madya	78	3,02
Utama	4	0,15
Belum diketahui	64	2,47
Jumlah	2.588	100

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 2021

### Penentuan Bobot Kriteria

Langkah awal penerapan analisis data menggunakan AHP adalah menentukan bobot kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengetahui urutan prioritas kriteria. Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan terkait dengan pengelolaan kelembagaan poktan menurut Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Poktan dari Kementerian Pertanian (2018). Kriteria pengelolaan kelembagaan poktan terdiri atas Perencanaan (A), Pengorganisasian (B), Pelaksanaan (C), Pengembangan Kepemimpinan Poktan (D), dan Pengendalian Pelaporan (E). Hasil perhitungan bobot kriteria pengelolaan poktan kelas utama di Kabupaten Pati menggunakan analisis AHP ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Prioritas bobot kriteria pengelolaan poktan kelas utama

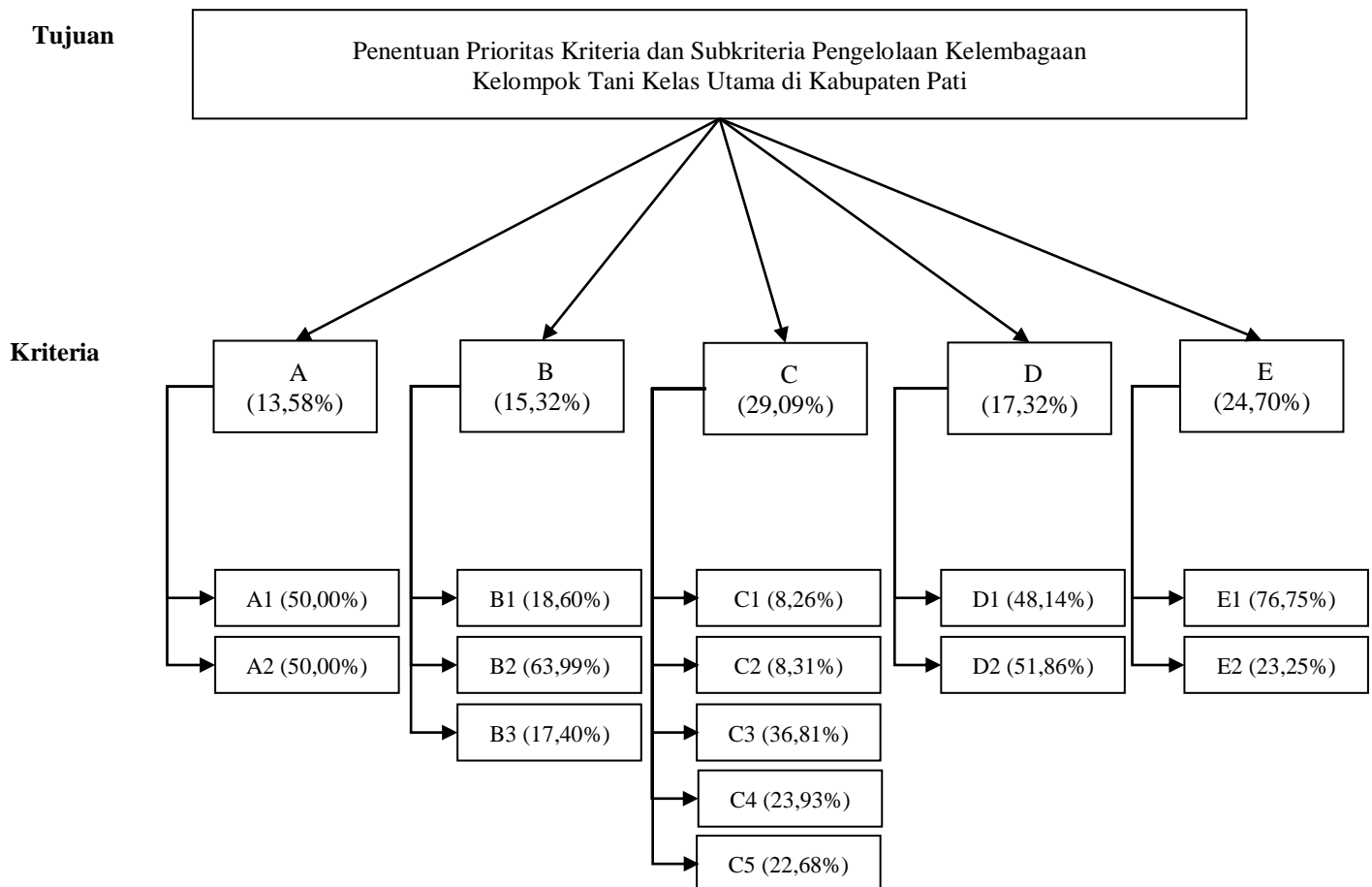
No	Kriteria	Bobot (%)	Prioritas
1.	Pelaksanaan (C)	29,09	1
2.	Pengembangan Kepemimpinan Poktan (E)	24,70	2
3.	Pengendalian dan Pelaporan (D)	17,32	3
4.	Pengorganisasian (B)	15,32	4
5.	Perencanaan (A)	13,58	5

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Tabel 5 menunjukkan bahwa kriteria yang memiliki bobot paling tinggi adalah Kriteria Pelaksanaan (C) dengan persentase 29,09%, diikuti Kriteria Pengembangan Kepemimpinan Poktan (E) dengan persentase 24,70%. Kriteria Pengendalian Pelaporan (D) menempati peringkat ketiga terbesar dengan persentase 17,32%, kemudian Kriteria Pengorganisasian (B) dengan nilai 15,32%, dan kriteria yang memiliki bobot paling rendah adalah Kriteria Perencanaan (A) dengan nilai 13,58%. Berdasarkan nilai tersebut, kriteria pengelolaan kelembagaan poktan kelas utama yang paling berpengaruh adalah Kriteria Pelaksanaan. Gambaran ini bisa dijadikan sebagai pedoman bagi poktan-poktan pada kelas dibawahnya untuk menempatkan Kriteria Pelaksanaan sebagai prioritas pertama dalam mengelola kelembagaan poktan.

### Penentuan Bobot Subkriteria

Setelah bobot kriteria pengelolaan kelembagaan poktan telah diketahui, langkah selanjutnya adalah menentukan bobot pada level subkriteria. Sama halnya dengan kriteria-kriteria yang digunakan, subkriteria-subkriteria pada penelitian ini juga mengacu pada Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Poktan. Terdapat 14 subkriteria yang berada dibawah kriteria dengan jumlah yang tidak sama, seperti yang telah ditampilkan pada pohon hierarki pada Gambar 1. Hasil penghitungan bobot subkriteria pada poktan kelas utama di Kabupaten Pati dengan analisis AHP ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil penghitungan AHP pengelolaan kelembagaan poktan kelas utama

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa kriteria pengelolaan poktan yang memiliki bobot paling tinggi adalah Kriteria Pelaksanaan (C). Kriteria pelaksanaan dipengaruhi oleh beberapa subkriteria yang berada di bawahnya. Subkriteria yang memiliki bobot paling tinggi adalah Subkriteria Pelaksanaan Usaha (C3) dengan persentase 36,81% selanjutnya Subkriteria Pemupukan Modal (C4) dengan persentase

23,93%, kemudian Subkriteria Pelayanan Informasi dan Teknologi (C5) dengan persentase 22,68%, diikuti Subkriteria Pelaksanaan Belajar (C2) dengan persentase 8,31 dan subkriteria yang memiliki bobot terendah adalah Subkriteria Pertemuan Rutin (C1) dengan persentase 8,26%. Berdasarkan nilai tersebut, subkriteria yang paling penting untuk diprioritaskan dalam kriteria Pelaksanaan adalah Subkriteria Pelaksanaan Usaha (C3).

### **Kriteria Pelaksanaan (C)**

#### **Subkriteria Pelaksanaan Usaha (C3)**

Kriteria pelaksanaan memiliki 5 subkriteria yaitu pertemuan rutin, pelaksanaan belajar, pelaksanaan usaha, pemupukan modal, dan pelayanan informasi teknologi. Pada kelas utama Kriteria Pelaksanaan menjadi urutan prioritas pertama. Tingginya nilai Kriteria Pelaksanaan pada kelas utama, disumbang dari Subkriteria Pelaksanaan Usaha sebesar 36,81%. Hal ini menunjukkan bahwa Subkriteria Pelaksanaan Usaha (C3) memberikan kontribusi 36,81% terhadap Kriteria Pelaksanaan, yang merupakan kontribusi tertinggi diantara 5 subkriteria pada Kriteria Pelaksanaan.

Sebagai kelas kelompok tani yang dianggap sudah mandiri, pelaksanaan usaha pada kelas utama sudah berorientasi pasar, memiliki nilai ekonomi tinggi, menerapkan Sistem Pertanian Terpadu/*Integrated Farming System* (SPT), berwawasan lingkungan dan sudah memiliki MoU dengan pihak lain (bukan bantuan/program) (Kementerian Pertanian, 2018). Penerapan SPT terbukti mampu meningkatkan produktivitas, kualitas, daya saing, dan nilai ekonomi dalam suatu usahatani (Pasaribu, 2015) yang dibutuhkan poktan kelas utama untuk memupuk modal. Banyak ditemukan penelitian yang mendukung bahwa penerapan SPT pada sistem usahatani mampu meningkatkan produktivitas padi, sehingga taraf hidup/pendapatan/keuntungan petani juga mengalami peningkatan (Siswati & Nizar, 2014; Sukanteri *et al.*, 2019; Guntoro, 2011).

Menjalin kerjasama jejaring/kemitraan dengan pihak luar atau MoU dengan suatu perusahaan, sangat membantu poktan dalam memperoleh informasi tentang harga pasar, jangkauan pemasaran, kebijakan baru pemerintah, dan teknologi-teknologi baru (Syahyuti, 2011). Hal ini dikarenakan bahwa poktan kelas utama sudah tidak bisa menerima kegiatan/program yang sifatnya bantuan karena dianggap sudah mandiri, sehingga poktan harus benar-benar mengoptimalkan pelaksanaan usaha agar mampu menghidupi operasional kelompok.

#### Subkriteria Pemupukan Modal (C4)

Keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan usaha tersebut, menjadi sumber utama pemupukan modal kelompok tani sehingga subkriteria Pemupukan modal menyumbang 23,93% dari kriteria Pelaksanaan pada poktan kelas utama. Pemupukan modal merupakan “bahan bakar” pokok dalam operasional poktan supaya poktan bisa berkembang. Sesuai dengan pernyataan Ediana (2021), bahwa terbatasnya modal merupakan salah satu faktor permasalahan tidak berkembangnya poktan. Poktan kelas utama dituntut untuk bisa mengembangkan usaha secara mandiri. Dalam pengembangan usaha baru tentu membutuhkan modal, karena poktan kelas utama harus sudah mampu melakukan kegiatan yang sifatnya tidak hanya *on farm* saja tetapi sampai pada kegiatan *off farm*/usaha penanganan pascapanen bahkan sampai pemasaran produk, yang pada akhirnya hasil dari kegiatan *on farm* tersebut akan memberikan tambahan modal bagi poktan (Wulanjari dan Setiani, 2019). Namun demikian, modal hanya akan bermanfaat optimal jika dibarengi dengan pendampingan manajemen (organisasi dan bisnis) serta teknologi (Syahyuti, 2011).

#### Subkriteria Pelayanan Informasi dan Teknologi (C5)

Pada kelompok tani kelas utama, pelayanan informasi teknologi berada pada urutan prioritas ke-3 dengan persentase 23,93%. Menurut Kementerian Pertanian (2018), informasi dan teknologi merupakan salah satu faktor pendukung dalam mengembangkan usaha tani poktan. Informasi dan teknologi yang dibutuhkan poktan bisa diperoleh dari berbagai sumber. Informasi dan teknologi pada poktan kelas utama diperoleh dari berbagai sumber berbasis IT, dimana pemanfaatannya tidak hanya untuk anggota poktan saja tapi juga kepada masyarakat tani. Narasumber yang memberikan materi tentang IT pada kelas utama lebih variatif karena sudah memiliki jejaring/kerjasama dengan banyak pihak, bahkan perusahaan swasta melalui fungsi CSR nya. Informasi dan teknologi yang diperoleh dapat membantu petani dalam memperlancar dan memudahkan petani dalam berusahatani. Semakin sering petani memperoleh/mengakses informasi dan teknologi maka semakin mudah proses kegiatan usahatani yang dilakukan dan pada akhirnya hasil produksinya juga akan mengalami peningkatan. Penerapan teknologi ini terutama sarana produksi pertanian berbasis teknologi modern selain untuk mengurangi biaya produksi juga bertujuan untuk menarik minat generasi muda dalam usahatani (Ediana, 2021).

Namun demikian, kebutuhan teknologi tidak harus jadi prioritas utama, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa terkadang materi

IT yang disampaikan narasumber tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan poktan sehingga menyebabkan penyampaian materi menjadi tidak efektif. Pemberian materi akan lebih tepat sasaran, apabila poktan memberikan usulan kepada dinas terkait mengenai materi yang dibutuhkan, untuk kemudian ditindaklanjuti dinas sebagai program/kegiatan penyuluhan ke poktan, karena yang mampu mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan tujuan suatu kelompok dengan mudah dan tepat adalah dengan melibatkan pihak-pihak internal kelompok secara partisipatif, bukan dari pihak di luar (Syahyuti, 2011). Selain itu, petani pada poktan kelas utama merasa bahwa informasi dan teknologi saat ini mudah diperoleh secara mandiri melalui media massa dan online, bahkan bisa diakses kapanpun. Pelayanan Informasi Teknologi akan lebih tepat sasaran ketika teknologi informasi yang diberikan mampu menjawab kebutuhan dan masalah yang terjadi pada poktan tersebut.

#### Subkriteria Pelaksanaan Belajar (C2)

Pelaksanaan belajar pada poktan kelas utama sudah harus melibatkan unsur dari dalam poktan, petani/poktan lain, dan dari lembaga/instansi lain. Kenyataannya, petani menganggap bahwa pelaksanaan belajar yang selama ini dilakukan kurang memberikan manfaat yang maksimal. Hal ini didasarkan pada kurangnya peran PPL baik secara kualitas maupun kuantitas, serta kurang minatnya petani dalam pelaksanaan belajar (Ediana, 2021). Petani menganggap bahwa hasil dari Pelaksanaan Belajar belum tentu bisa dimanfaatkan/diterapkan, sehingga petani lebih memprioritaskan Pelaksanaan Usaha dibandingkan Pelaksanaan Belajar karena dalam Pelaksanaan Usaha petani sekaligus melaksanakan proses belajar. Saat ini pelaksanaan belajar telah mengalami pergeseran ke arah *online* melalui media sosial. Setiap BPP Kecamatan telah memiliki akun media sosial seperti facebook, instagram, youtube, WAG, dan media sosial lainnya sebagai sarana untuk mentransfer informasi teknologi ke petani. Namun demikian, pelaksanaan belajar secara *offline* (tatap muka) masih sangat penting dilakukan untuk tetap menjaga interaksi/kedekatan antar anggota dalam poktan. Kondisi inilah yang mendudukkan Subkriteria Pelaksanaan Belajar berada pada prioritas keempat dengan persentase 8,31%.

#### Subkriteria Pertemuan Rutin (C1)

Idealnya, pertemuan rutin pada poktan kelas utama dilakukan setiap 2 minggu sekali, dengan rata-rata kehadiran >75% anggota, dengan materi yang diberikan berupa materi usahatani dari hulu-hilir, serta hasil pertemuan rutin tersebut tercatat pada notulen (Kementerian Pertanian, 2018). Namun faktanya, pertemuan rutin tidak bisa dilakukan

sesuai dengan pedoman terkait. Hal ini dikarenakan susahnyanya mengatur waktu untuk memastikan bahwa semua anggota poktan atau sebagian besar anggota poktan bisa menghadiri pertemuan rutin tersebut. Kegiatan pada poktan kelas utama lebih variatif (tidak sekadar *on farm*, tapi juga *off farm* dan pemasaran), lebih membutuhkan waktu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibandingkan kegiatan pada poktan kelas lain, sehingga anggota poktan lebih memilih melaksanakan usaha dibanding menghadiri pertemuan rutin. Selain itu juga ditemukan fakta bahwa anggota poktan kelas utama banyak yang memiliki usaha sampingan di luar poktan. Kecuali jika ada kasus/permasalahan yang sifatnya penting untuk dibahas segera terutama kaitannya dengan pelaksanaan usaha. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menempatkan sub-kriteria Pertemuan Rutin sebagai prioritas urutan terakhir dengan persentase 8,26%, tidak berbeda jauh dengan sub-kriteria Pelaksanaan Belajar (8,31%), karena kenyataannya pelaksanaan belajar memang biasanya dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan rutin.

#### Kriteria Pengembangan Kepeimpinan Poktan (E)

Kriteria pengembangan kepemimpinan poktan memiliki 2 subkriteria, yaitu pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus. Pada poktan kelas utama, pengembangan kapasitas idealnya berupa adanya pergantian pengurus yang memiliki kemampuan manajerial, teknis, dan sosial. Pemilihan pengurus poktan harus benar-benar dilakukan secara cermat, karena memiliki peran penting dalam kelangsungan kelembagaan poktan. Poktan dengan kelas utama sadar betul bahwa peran pemimpin/pengurus poktan memegang peran penting dalam pergerakan poktan, terutama kaitannya dengan banyaknya usaha yang harus diurus. Menurut Dinar (2019), kepemimpinan poktan memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kerja poktan, melalui kemampuan pemimpin poktan dalam mengkoordinasi setiap anggotanya dengan memberikan pengarahan, perencanaan yang matang, dan semangat kerja. Sejalan dengan Rahayu dan Malia (2018) bahwa fungsi kelompok tani akan berjalan baik apabila pemimpin/ketua kelompok tani mampu menggerakkan anggota kelompok tani untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan.

Pengkaderan pengurus merupakan salah satu bagian dari pengembangan kapasitas. Kaderisasi pengurus poktan dapat dilakukan melalui pembinaan anggota (Amanah dan Farmayanti, 2014), sehingga prioritas pertamanya adalah adanya pengembangan kapasitas (76,75%) yaitu adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial, agribisnis, dan kewirausahaan, baru kemudian bisa melakukan

prioritas kedua yaitu pengkaderan pengurus/anggota poktan (23,25%). Jika pemimpin poktan belum memiliki kemampuan tersebut (manajerial, agribisnis, dan kewirausahaan), maka akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengkaderan anggota/pengurus. Oleh karena itu, perlu dilakukan reorganisasi poktan secara berkala, yang prosesnya dilakukan dengan pendampingan dari PPL. Hal ini bertujuan untuk mencegah berhentinya kerja poktan jika ketua poktan sakit/meninggal/pindah/tidak lagi bersedia menjabat sebagai ketua poktan. Kondisi yang selama ini banyak ditemukan adalah, ketika terjadi kekosongan ketua, baru dilakukan reorganisasi. Proses reorganisasi ini tidak selalu berhasil karena belum sempat dilakukan kaderisasi. Kondisi inilah yang menyebabkan poktan kolaps dan berpotensi bubar.

#### Kriteria Pengendalian dan Pelaporan

Subkriteria pada kriteria pengendalian pelaporan adalah evaluasi dan monitoring usaha kelompok. Evaluasi dan monitoring yang idealnya dilakukan pada poktan kelas utama meliputi evaluasi dan monitoring perencanaan dan pelaksanaan usaha secara tertulis dengan melibatkan unsur dari dalam poktan, petani/poktan lain, dan lembaga/instansi lain. Evaluasi dan monitoring merupakan dua kegiatan terpadu yang dilakukan dalam rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kegiatan, evaluasi dan monitoring memiliki fokus yang berbeda. Monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian kegiatan yang sedang berlangsung dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan evaluasi dilakukan di akhir kegiatan dengan tujuan mengetahui hasil atau capaian akhir dari suatu kegiatan yang hasilnya bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya (Azteria, 2019). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa monitoring merupakan bagian dari evaluasi. Konsep ini serupa dengan hasil penelitian ini yang menempatkan Subkriteria Evaluasi Usaha Kelompok memiliki bobot yang lebih tinggi yaitu 51,86% dibandingkan subkriteria Monitoring Usaha Kelompok dengan bobot 48,14%.

Kegiatan evaluasi dan monitoring meliputi evaluasi dan monitoring pada kegiatan perencanaan (RDK, RDKK), kegiatan pelaksanaan, dan kinerja organisasi (Margolang, 2018). Evaluasi dan monitoring dilakukan secara periodik dalam rentang waktu yang telah ditentukan, dan umumnya dilakukan bersamaan dengan agenda Pertemuan Rutin sebulan sekali. Hal ini menjadikan proses evaluasi dan monitoring menjadi lambat dan memakan waktu (Bagu dkk, 2022). Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa mengagendakan suatu pertemuan rutin menjadi hal yang sulit dilakukan pada poktan



kelas utama karena keterbatasan waktu yang dimiliki masing-masing anggota/pengurus poktan.

### **Kriteria Pengorganisasian (B)**

#### Subkriteria Aturan dan Norma

Aturan dan norma pada poktan kelas utama harus ada dan tertulis. Aturan dan norma harus dipatuhi oleh anggota/pengurus poktan, termasuk sanksinya jika aturan dan norma tersebut diabaikan. Aturan dan norma memegang peran penting dalam kerjasama antar anggota poktan, sama halnya dengan pernyataan Wuysang (2014) bahwa dalam kerjasama dibutuhkan aturan, norma, tanggungjawab serta rasa saling percaya diantara anggota poktan. Terbangunnya dan diterimanya aturan norma oleh para petani terjadi melalui proses negosiasi yang berlangsung terus-menerus akibat interaksi yang terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama.

Pada poktan kelas utama, aturan dan norma telah terbukti secara nyata memberikan keuntungan petani sebagai anggota poktan. Aturan norma yang ada harus mampu memberikan manfaat, karena petani akan membandingkan antara kompensasi yang diperolehnya jika mengikuti aturan norma dalam poktan tersebut, dengan pengorbanan yang harus diberikannya. Jika aturan norma tidak memberikan manfaat (tambahan pendapatan) atau tidak sebanding, maka petani akan enggan mengikuti aturan tersebut dan pada akhirnya tidak berpartisipasi aktif dalam pengembangan poktan (Syahyuti, 2011). Kondisi inilah yang menyebabkan Subkriteria Aturan dan Norma menjadi penyumbang terbesar dalam kriteria Pengorganisasian (63,99%).

#### Subkriteria Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada kelas utama lebih kompleks dibandingkan dengan poktan kelas lain, ada pembagian tugas yang dapat dilaksanakan dengan baik. Semakin tinggi kualitas suatu kelompok/organisasi maka struktur organisasinya akan semakin kompleks (Syifa, 2019). Dalam suatu pengorganisasian, struktur organisasi berperan penting karena terkait dengan pembagian tugas dan siapa yang melaksanakannya. Pada penelitian ini, Subkriteria Struktur Organisasi berada pada urutan kedua dengan persentase 18,60%.

Struktur organisasi poktan paling tidak harus memiliki 3 posisi yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Suatu kelompok akan berjalan jika organisasinya kuat. Pelaksanaan usaha/kegiatan akan tetap jalan, dengan atau tanpa bantuan jika organisasinya kuat. Jika pengorganisasian tidak kuat, maka pelaksanaan usaha akan

berjalan sekadarnya saja atau bahkan tidak terlaksana sehingga menyebabkan poktan tidak bertahan lama dan pada akhirnya bubar. Pengurus poktan dengan organisasi buruk biasanya tidak bisa diajak diskusi karena tidak memahami seluk beluk kepengurusan poktan. Oleh karenanya, pemilihan ketua dan pengurus poktan harus dipilih secara hati-hati dan demokratis dimana semua anggota memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.

#### Subkriteria Administrasi Pembukuan

Pengembangan administrasi kelompok sangat penting untuk mengendalikan perilaku setiap anggota dan untuk memantau perkembangan kegiatan. Dengan pembukuan yang baik, pelaksanaan kegiatan akan berjalan baik pula dan memberi peluang pada pihak luar untuk membantu mengembangkan kelompok. Buku administrasi merupakan instrumen penting dalam suatu poktan. Pembukuan administrasi yang bagus dapat menunjang jalannya organisasi poktan, mendorong kelompok menjadi transparan dan jelas sehingga menimbulkan rasa saling percaya di antara anggota poktan yang pada akhirnya mempengaruhi harmonisasi dalam bekerjasama. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan usaha kelompok di kemudian hari. Pembukuan ini juga bisa digunakan sebagai bahan informasi jika diperlukan, baik bagi kelompok maupun pihak lain, seperti usaha pemodalan, jaringan kerjasama dan lain-lain. Pada penelitian ini, petani beranggapan bahwa Subkriteria Administrasi Pembukuan berada pada prioritas paling akhir dengan persentase 17,40%, setelah Subkriteria Aturan Norma dan Subkriteria Struktur Organisasi. Administrasi pembukuan akan berjalan sebagaimana seharusnya jika aturan norma dan struktur organisasi poktan telah lebih dahulu dijalankan sesuai prosedur.

#### Kriteria Perencanaan (A)

Kriteria Perencanaan memiliki 2 subkriteria yaitu Rencana Usaha dan Rencana Belajar. Rencana usaha dan rencana belajar pada poktan kelas utama idealnya berupa adanya rencana belajar secara tertulis dengan melibatkan petani/poktan dan lembaga/instansi lain, sedangkan untuk rencana usaha berupa adanya rencana usaha bersama dan bemitra dengan pihak lain (MoU). Hasil penghitungan AHP menyatakan bahwa antara rencana belajar dan rencana usaha pada poktan kelas utama memiliki persentase yang sama yaitu masing-masing 50%. Petani merasa bahwa dalam pengelolaan poktan, rencana belajar dan rencana usaha memiliki porsi yang sama penting. Petani yang tergabung dalam poktan harus mampu mengenali kebutuhan, permasalahan yang

dihadapi, potensi yang dimiliki serta mampu secara mandiri menyusun rencana belajar dan rencana usaha untuk meningkatkan pendapatannya melalui usaha tani. Dengan mengetahui kebutuhan, permasalahan, dan potensi yang dimiliki, rencana belajar dan rencana usaha yang tersusun akan memberikan manfaat yang tepat sasaran. Rencana belajar dan rencana usaha disusun oleh pengurus beserta anggotanya saat melakukan pertemuan rutin secara berkala.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani dari Kementerian Pertanian (2018) disebutkan bahwa pengelolaan kelembagaan kelompok tani dipengaruhi oleh 5 kriteria yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian Pelaporan, dan Pengembangan Kepemimpinan Poktan. Pada penelitian ini, dengan menggunakan AHP diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa diantara 5 kriteria pengelolaan kelembagaan poktan tersebut, kriteria yang memiliki bobot paling tinggi atau kriteria yang menjadi prioritas pertama pada poktan kelas utama adalah Kriteria Pelaksanaan (C) persentase 29,09%. Kriteria yang menjadi prioritas terakhir adalah Kriteria Perencanaan dengan persentase 13,58%.

Masing-masing kriteria memiliki subkriteria-subkriteria dibawahnya yang berfungsi sebagai indikator untuk mencapai kriteria diatasnya, guna mencapai tujuan awal yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu menentukan prioritas kriteria dan subkriteria pengelolaan kelembagaan poktan kelas utama di Kabupaten Pati. Hasil analisis AHP pada penelitian ini menunjukkan bahwa diantara 5 subkriteria pada Kriteria Pelaksanaan (sebagai kriteria yang menjadi prioritas pertama), yang menjadi prioritas pertama adalah Subkriteria Pelaksanaan Usaha (C3) dengan persentase 36,81%.

### **Saran**

Perlu dilakukan penelitian serupa terkait kelompok tani pada kelas lainnya (kelas pemula, kelas lanjut, dan kelas madya), untuk mengetahui kondisi eksisting pada poktan masing-masing kelas. Sehingga, poktan pada tiap kelas tersebut dapat mengetahui kriteria dan subkriteria mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk bisa naik kelas berdasarkan hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S., & Farmayanti, N. (2014). *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anantanyu, S. (2009). *Partisipasi Petani dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah)*.
- Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *SEPA*, 7(2), 102–109.
- Andriati, & Wigenda, I. G. P. (2011). Strengthening Institutional Aspects of Plantation Revitalisation Programme for Replanting of Smallholder Oil Palm Plantation. *Jurnal Agro Ekonomi*, 29(2), 169–190.
- Arifin, B. (2004). *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Azteria, V. (2019). *Modul Sesi 7: Monitoring dan Evaluasi Lingkungan*. Universitas Esa Unggul.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. (2021). *Kabupaten Pati dalam Angka 2021*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. (2022). *Kabupaten Pati dalam Angka 2022*.
- Bagu, I., Saleh, Y., & Bakari, Y. (2022). Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *Agronesia Vol 6, No 3, Juli 2022*: 198-205.
- Dermoredjo, S.K., & Noekman, K. (2006). Analisis Penentuan Indikator Utama Pembangunan Sektor Pertanian di Indonesia: Pendekatan Analisis Komponen Utama. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Vol 6, No 2, Juli 2006*.
- Dinar. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Ketua Kelompok Tani terhadap Efektivitas Kelompok. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*, 7(2): 12-17.
- Ediana, E. (2021). Evaluasi dan Strategi Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani Tahun 2019 (Studi di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo). *Magister Agribisnis Vol 21 No 1, Januari 2021*: 12-25.
- Guntoro, S. (2011). *Saatnya Menerapkan Pertanian Tekno-Ekologis*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Kementerian Pertanian. (2018b). *Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani*. <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/98314/Panca-Kemampuan-Kelompok-Tani/>
- Kristianto, L. K. (2022). Strategi Penguatan Kinerja Kelompok Ternak Kerbau Kalang Menggunakan Metode AHP di Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Teknologi Dan Agribisnis Peternakan IX: "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Peternakan Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Mewujudkan Kedaulatan*

*Pangan” Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, 14-15 Juni 2022, 243–254.*

- Lubis, F. A., Harisudin, M., Fajarningsih, & Uchyani, R. (2019). Strategi Pengembangan Agribisnis Cabai Merah di Kabupaten Sleman dengan Metode Analytical Hierarchy Process. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 5(2). <https://doi.org/10.18196/agr.5281>
- Margolang, N. (2018). Strategi Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani. *Jurnal Agro Riau Vol 1, No. 3 Tahun 2018: 1-18.*
- Munthafa, A. E., & Mubarak, H. (2017). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi. *Jurnal Siliwangi*, 3(2), 192–201.
- Nasrul, W. (2012). Pengembangan Kelembagaan Pertanian untuk Peningkatan Kapasitas Petani terhadap Pembangunan Pertanian. *Menara Ilmu Vol III, No. 29, Juni 2012: 166-174.*
- Nursita, Wahyono, & Hertamawati. (2021). Peran Pemerintah terhadap Pengembangan Penggunaan Pupuk Organik pada Kelompok Tani di Kabupaten Banyuwangi The Role of the Government in the Development of the Use of Organic Fertilizers to Farmers in Banyuwangi Regency dalam Peningkatkan Ketahanan Pangan. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 21(3), 190–198.
- Pasaribu, S. M. (2015). Program Kemitraan dalam Sistem Pertanian Terpadu. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 13(1), 39–54. <https://doi.org/10.21082/akp.v13n1.2015.39-54>.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
- Prakoso, L. Y., Suhirwan, & Prihantoro, K. (2021). *Metode SWOT AHP dalam Merencanakan Strategi Pertahanan*. CV. Aksara Global Akademia.
- Prasetyono, D. W. 2019. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani sebagai Pilar Pemberdayaan Petani. *Prosiding PKM-CSR Vol 2 (2019): 1285-1293.*
- Purnamasari, A. Y. (2017). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam Meningkatkan Penerapan Pertanian Organik melalui Pengambilan Keputusan dengan Metode Analytical Network Process (Studi di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso). In *Skripsi*.
- Rahayu, T., & Malia, R. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Ketua Kelompok Terhadap Tingkat Kemandirian Anggota Kelompok Di Gabungan Petani Organik (Gpo) Nyi-Sri Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. *Agroscience (Agsci)*, 8(1). <https://doi.org/10.35194/agsci.v8i1.357>
- RKPD Kabupaten Pati, (2023). Laporan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Pati: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

- Siswati, L., & Nizar, R. (2014). Kesejahteraan Petani Pola Pertanian Terpadu Tanaman Hortikultura dan Ternak. *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Peternakan* Vol XVII, No. 1, Mei 2014: 10-14.
- Sudradjat, A., Sodikin, M., & Komarudin, I. (2020). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process terhadap Pemilihan Merek CCTV. *Jurnal Infortech*, 2(1), 19–30. <https://doi.org/10.31294/infortech.v2i1.7660>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *CV. Alfabeta*.
- Sukanteri, N. P., Suparyana, P. K., Suryana, I. M., Setyawan, I. M. D. (2019). Teknologi Pertanian Terpadu Berbasis Filosofi Tri Hita Karana dalam Usahatani Menuju Pertanian Organik. *Agrisocionomic, Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian* Vol 3, No. 2 Tahun 2019: 98-106.
- Suryana, A., Rusastra, I. W., Sudaryanto, T., & Pasaribu, S. M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian. Penerbit IA ARD PRESS, Jakarta. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- Susilowati, I., & Kirana, M. (2008). Menuju Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan yang Berbasis pada Ekosistem: Studi Empiris di Karimunjawa, Jawa Tengah. *Penelitian Hibah Kompetensi, November*, 54.
- Syahyuti. (2011). Gampang-gampang Susah Mengorganisasikan Petani, Kajian Teori dan Praktek Sosiologi Lembaga dan Organisasi. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Syifa, N. A. (2019). Manajemen Kelompok Tani Risma Asri Pekon Gisting Kabupate Tanggamus. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Univeristas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Wulanjari, M. E., & Setiani, C. (2019). Hubungan Antara Dinamika Kelompok dengan Produktivitas Kelompok Tani. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pertanian. Kesiapan Sumber Daya Pertanian dan Inovasi Spesifik Lokasi Memasuki Era Industri 4.0. Kabupaten Semarang, 9 Oktober 2019.
- Wuysang, R. (2014). Modal Sosial Kelompok Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Suatu Studi dalam Pengembangan Usaha Kelompok Tani di Desa Tincep Kecamatan Sonder). *Jurnal Acta Diurna* Vol 3, No 3 Tahun 2014.